

ISBN 978-979-8191-46-6



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN**



MENELISIK KETAHANAN PANGAN, KEBIJAKAN PANGAN, DAN SWASEMBADA BERAS

Oleh Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
Bogor, 20 Agustus 2007



ISBN 978-979-8191-46-6



Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Sosial Ekonomi Pertanian

MENELISIK KETAHANAN PANGAN, KEBIJAKAN PANGAN, DAN SWASEMBADA BERAS

Dr. Ir. Achmad Suryana, MS

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
BOGOR, 20 AGUSTUS 2007**

PRAKATA PENGUKUHAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

Untuk memulai prosesi yang penting ini marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada kita semua, khususnya yang hadir pada acara orasi hari ini. Lebih khusus lagi, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kesempatan berkiprah dan kesehatan yang diberikan kepada saya, sehingga mampu menapaki karier seperti sekarang ini.

Pada kesempatan orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset ini, sesuai dengan pilihan bidang keilmuan dan aspek yang dominan ditekuni selama ini, perkenankan saya menyampaikan topik bahasan dengan judul "Menelisik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras".

Orasi ini disajikan dalam susunan bab berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN
- III. TINJAUAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN SAAT INI
- IV. KERAGAAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL
- V. ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
- VI. KESIMPULAN
- VII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Hadirin yang saya muliakan,

Selama 62 tahun merdeka, walau telah beberapa kali berganti pemerintahan, filosofi dasar pengelolaan kebijakan pangan nasional di Indonesia hampir tidak mengalami perubahan yang berarti. Dokumentasi mengenai hal ini cukup lengkap ditulis oleh berbagai kalangan, baik praktisi di pemerintahan maupun para peneliti (dapat dipelajari dalam Badan Urusan Logistik, 1971; Mears, 1982; Silitonga, 1997; Suryana, 1998; Amang dan Sawit, 2001; Suryana dan Mardianto, 2001; Sawit, 2002; Kasryno *et al.*, 2004).

Sejarah perekonomian pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencatat dengan jelas bahwa para pemimpin negara ini secara konsisten meletakkan ekonomi pangan sebagai sesuatu hal yang sangat strategis. Presiden RI pertama Soekarno menyadari betul pentingnya penyediaan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya. Pada tanggal 27 April 1952, pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, Presiden Soekarno menyatakan bahwa: "*..... Apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahwa mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari..... oleh karena itu, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makan rakyat*".

Pandangan dan pola pikir seperti ini masih berlanjut dianut oleh Presiden RI kedua Soeharto. Ini terbukti bahwa 21 tahun kemudian, pada 11 Mei 1973, dalam salah satu acara kunjungan kerja di Yogyakarta, Presiden RI Soeharto waktu itu mengemukakan: "*.....Kita harus menghasilkan sendiri bahan-*

bahan pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita telah ketahui agar kestabilan daripada harga beras itu betul-betul akan terjamin....." (Sawit et al., 2002).

Pada masa reformasi, dimulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri, isu pangan dan beras ini tetap menjadi prioritas (Suryana, 2003a). Dalam masa-masa pemerintahan tersebut, yang dicirikan oleh adanya krisis ekonomi yang cukup berat, swasembada beras tetap menjadi sasaran utama kebijakan pangan. Pada periode tersebut, untuk merespon menurunnya produksi beras domestik karena krisis ekonomi dan anomali iklim (kemarau panjang), pemerintah berkali-kali dalam waktu relatif singkat menaikkan harga dasar gabah, mengeluarkan kebijakan insentif berproduksi¹⁾ dan membuka lebar pasar domestik bagi beras impor.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, filosofi kebijakan umum perberasan pada intinya tetap sama dengan pemerintahan era-era sebelumnya, dengan variasi pada tataran

¹⁾ Subsidi pupuk dicabut pada periode Menteri Pertanian Soleh Solahuddin, namun sebagai kompensasi pencabutan subsidi pupuk tersebut, Kredit Usahatani (KUT) dikururkan dalam jumlah yang besar dengan prosedur yang diperlonggar. Subsidi pupuk dihidupkan kembali pada masa Menteri Pertanian Bungaran Saragih. Pada periode Menteri Pertanian Prakosa, pola bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) mulai diperkenalkan. Pada tahun 2000 disalurkan dana BLM sekitar Rp. 600 miliar, untuk pembelian sarana produksi dan keperluan usahatani lainnya. Subsidi benih yang pada masa Menteri Pertanian Soleh Solahuddin direncanakan untuk di-"phase-out" dalam waktu empat tahun, ternyata terus dilanjutkan oleh para penerusnya sampai sekarang. Kebijakan meliberalisasi pasar beras domestik di awal reformasi, kembali dikoreksi oleh pemerintahan berikutnya. Sekarang pasar beras domestik kembali tertutup, kecuali produksi dalam negeri dinilai tidak akan mencukupi. Keputusan impor beras diambil oleh beberapa menteri terkait.

kebijakan operasionalnya²⁾. Penegasan sikap ini ditandai dengan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh Presiden RI tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Salah satu tujuan RPPK adalah membangun ketahanan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005).

²⁾ Kebijakan perberasan terakhir yang mendukung pernyataan tersebut yaitu ditetapkannya target pencapaian tambahan kenaikan produksi beras sebesar 2,0 juta ton atau 6,4% pada tahun 2007. Sasaran kebijakan ini adalah dengan tingkat produksi ini diharapkan Indonesia tidak perlu lagi impor beras, yang merupakan isu politik ekonomi yang sangat sensitif.

II. DINAMIKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PANGAN

A. Definisi dan Paradigma Ketahanan Pangan

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang saya muliakan,

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, bahkan internasional. Pada tataran internasional, penegasan bahwa hak atas pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak azasi manusia tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1952. Setelah itu, upaya global untuk mewujudkan hak atas pangan tersebut terus bergulir, di antaranya dicerminkan dalam isi deklarasi yang dihasilkan dalam *World Food Summit* pada tahun 1996, *Millenium Development Goals* tahun 2000, dan *World Food Summit, five years later*, tahun 2002 (FAO, 1996; 2002).

World Food Summit tahun 2002 menyepakati "*Declaration of the World Food Summit on International Alliance Against Hunger*". Deklarasi ini mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional terletak pada pemerintah dan masyarakat di negara masing-masing, yang disertai dengan dukungan penuh dari masyarakat internasional. Untuk melaksanakan hal itu perlu aliansi internasional untuk mengikis kelaparan (FAO, 2002; Suryana, 2002).

Di Indonesia, jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, masalah pangan telah menjadi isu utama dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional. Raja-raja Jawa dilaporkan mempunyai perhatian penuh untuk memupuk cadangan pangan. Demikian

pula pemerintah kolonial Belanda membentuk badan khusus untuk menangani pengadaan pangan, yaitu *Stichting Het Voedings Middelensfonds* (VMF) (Badan Urusan Logistik, 1971; Silitonga, 1997, Soekirman *et al.*, 2004; Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Pada era kemerdekaan, peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur kebijakan ketahanan pangan nasional adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Di dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan secara khusus tentang konsep ketahanan pangan dan bagaimana mewujudkannya.

Sejalan dengan evolusi pemikiran tentang pangan dan ketahanan pangan, definisi ketahanan pangan juga dirumuskan secara beragam dan berkembang sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing, baik pada tataran global maupun nasional (Suryana, 2003b; Wiganda, 2003; Arifin, 2004). Hal ini disebabkan ketahanan pangan (*food security*) mencakup banyak aspek, mulai dari penyediaan, distribusi dan konsumsi (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Pada tahun 1970-an, diskusi tentang pencapaian ketahanan pangan sering lebih ditekankan pada aspek penyediaan pada tingkat global dan nasional, sehingga sasaran pembangunan ketahanan pangan suatu negara adalah bagaimana menyediakan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk. Mulai dekade 1980, fokus kebijakan ketahanan pangan beralih bukan pada aspek penyediaan di tingkat makro (nasional) saja, tetapi juga ditekankan untuk kecukupan di tingkat rumah tangga, bahkan individu. Perkembangan selanjutnya, upaya pemantapan ketahanan pangan dikaitkan dengan aspek-aspek yang lebih luas.

Evolusi pemikiran tersebut diabstraksikan oleh Simatupang (2007)³⁾, dengan mengklasifikasikannya berdasarkan tahapan evolusi pemikiran ketahanan pangan sebagai berikut:

- a. Pendekatan ketersediaan pangan (*Food Availability Approach*).
- b. Pendekatan perolehan pangan (*Food Entitlement Approach*).
- c. Pendekatan ketahanan pangan berkelanjutan (*Sustainable Food Security*).
- d. Pendekatan *Nutritional Food Security*.
- e. Pendekatan kedaulatan pangan (*Food Sovereignty*).

Pada tingkat global, definisi ketahanan pangan dinyatakan sebagai berikut: "*food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life*". (FAO, 1996). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa kondisi ketahanan pangan tercapai apabila: (a) setiap individu pada setiap saat mempunyai akses terhadap pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi, dan (b) pangan tersebut harus cukup, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan energi untuk menjalankan kehidupan yang aktif, sehat, dan produktif.

Di Indonesia, pengertian ketahanan pangan secara formal dirumuskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yaitu: "*terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau*". Definisi ini

³⁾ Prof. Dr. Pantjar Simatupang menyajikan abstraksi pemikiran ini dalam komunikasi tertulis pada proses penyusunan naskah orasi ini.

maknanya tidak jauh berbeda dengan definisi *food security* di atas.

Dari definisi tersebut, untuk keperluan praktis dan implementasi kebijakan serta program, dapat diidentifikasi penjabarannya sebagai berikut (Suryana 2001a, 2001b, 2003a; Dewan Ketahanan Pangan, 2006):

1. Pada tataran kebijakan nasional: (a) pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dari hasil produksi sendiri merupakan kebijakan pokok ekonomi pangan nasional, (b) kebijakan penyediaan pangan dari hasil produksi sendiri diperoleh dengan memanfaatkan, melestarikan, dan meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal, dan (c) kebijakan pemerataan pangan antarwaktu, antarwilayah, dan antarkelas pendapatan ditangani melalui pengelolaan cadangan pangan, distribusi, dan harga pangan.
2. Pada tataran rumah tangga: (a) unit pokok kelompok sasaran ketahanan pangan adalah individu-individu dalam suatu rumah tangga, (b) tolok ukur pencapaian ketahanan pangan adalah terjaminnya aksesibilitas fisik dan ekonomi atas pangan, dan (c) ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga tersebut harus dapat menjamin agar setiap anggota rumah tangga memperoleh pangan dengan jumlah yang cukup untuk hidup sehat dan produktif.
3. Pada tataran komoditas: (a) karakteristik pangan yang dikonsumsi diarahkan agar memiliki mutu gizi yang baik untuk kesehatan dan aman (*safety*), serta halal bagi warga muslim, dan (b) walaupun jenis pangan itu beragam dan sangat

banyak, yang menjadi titik perhatian untuk ditangani melalui intervensi pemerintah terbatas/dibatasi pada beberapa pangan pokok⁴⁾.

B. Kebijakan Pangan

Hadirin yang saya muliakan,

Dari uraian di atas, politik ekonomi pangan atau kebijakan pangan nasional yang dibangun sejak Indonesia merdeka, secara filosofis kerangka dasarnya tidak berubah, dan diperkirakan tidak akan berubah dalam periode 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Rumusan umum kebijakan pangan nasional tersebut adalah:

1. Pada tataran makro, pemantapan ketahanan pangan diyakini merupakan salah satu pilar utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional, karena: (a) ketahanan pangan terkait erat dengan ketahanan ekonomi dan stabilitas politik nasional, (b) pencapaian ketahanan pangan merupakan basis bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, dan (c) pemantapan ketahanan pangan, yang berarti pemenuhan

⁴⁾ Sampai akhir tahun 1980-an, istilah sembilan bahan pokok atau sembako (lebih setengahnya komoditas pangan) masih sering dibicarakan sebagai tolok ukur kinerja ekonomi nasional. Pada saat ini kebijakan tersebut telah bergeser. Untuk pangan, telah ditetapkan lima komoditas pangan (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi) menjadi perhatian utama, sedangkan pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, ditambah dengan beberapa komoditas esensial seperti minyak goreng, telur, cabai merah, bawang merah, dan kacang tanah, yang mendapatkan perhatian penuh pemerintah dalam hal penyediaan, distribusi, dan stabilitas harganya.

pangan bagi setiap individu, merupakan perwujudan hak asasi manusia atas pangan.

2. Pada tataran praktis, kebijakan pangan diwarnai sangat dominan oleh kebijakan ekonomi beras, dengan sasaran utama untuk menyediakan beras dari produksi domestik (swasembada) dengan harga yang terjangkau oleh sebagian besar penduduk. Definisi swasembada beras berkembang dari swasembada mutlak, *on trend* dalam suatu kurun tahun tertentu, dan proporsional mulai dari 90% sampai 99% pemenuhan kebutuhan nasional.

Kebijakan pangan pada intinya berkaitan dengan pengaturan dan fasilitasi pemerintah atas segala aspek ekonomi pangan. Mulai dari cara memproduksinya, mengolahnya, menyediakannya, memperolehnya, mendistribusikannya, dan mengkonsumsinya merupakan aspek-aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah di bidang pembangunan pangan yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi, fasilitasi, dan intervensi. Definisi umum pangan berdasarkan PP Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah: *"segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman"*.

Tentu saja, dengan definisi komoditas pangan seperti tersebut di atas, akan sangat banyak jenis pangan yang dapat dikonsumsi. Sebagian besar dari kelompok komoditas tersebut tidak disentuh oleh pengaturan pemerintah dan memang tidak perlu diatur oleh kebijakan ketat pemerintah. Pemerintah baru

akan berperan apabila pangan tersebut diperdagangkan, dalam rangka menjamin dipenuhinya standar mutu, kesehatan, dan kehalalan pangan. Penetapan harga pangan secara umum sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Untuk beberapa pangan pokok atau pangan strategis bagi perekonomian nasional dan pada waktu-waktu tertentu, intervensi pemerintah dalam penyediaan, distribusi, dan harga pangan memang perlu dilakukan guna menjamin stabilitas ketahanan pangan.

Hadirin yang saya hormati,

Di Indonesia dalam tataran kebijakan ekonomi makro, sering kali pembangunan ketahanan pangan direduksi sebagai upaya pencapaian ketahanan pangan beras, karena beras telah dijadikan komoditas strategis secara ekonomi dan politik. Kebijakan pangan pada umumnya terkonsentrasi pada upaya penyediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat sepanjang waktu. Persepsi ini tidak hanya dianut oleh unsur-unsur pemerintah saja, tetapi juga dipahami oleh komponen bangsa lainnya, seperti anggota legislatif, wakil-wakil organisasi kemasyarakatan, dan pengasuh media massa⁵⁾. Lebih jauh Bustanil Arifin (1997) yang menjadi Kepala Bulog selama 20 tahun (1973-1993) mengemukakan beras mempunyai kedudukan yang teramat vital dan fatal. Vital karena beras adalah

⁵⁾ Tatkala pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras dalam jumlah sebesar 210.000 ton (0,1% kebutuhan) pada September 2006, pernyataan para anggota legislatif, tokoh masyarakat dan pengamat, termasuk opini redaksi yang pro dan kontra (dominan) menghiasi halaman media massa cetak dan elektronik dalam beberapa hari.

kebutuhan dasar manusia Indonesia dan fatal apabila penyediaannya defisit lantas dapat dijadikan alat oleh kekuatan politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang di luar kekuasaan saat ini. Penilaian mantan Kepala Bulog tersebut masih sangat relevan sampai kini. Oleh karena itu, beras selalu ditempatkan sebagai komoditas utama dalam penyusunan konsep dan implementasi kebijakan perekonomian Indonesia (Kasryno dan Pasandaran, 2004).

Untuk mencapai pertumbuhan produksi beras dalam negeri yang tinggi dalam rangka mengejar pertumbuhan permintaannya, dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun merdeka telah dilaksanakan berbagai program peningkatan produksi padi, seperti Padi Sentra, Bimas (Bimbingan Massal) dengan berbagai variasinya seperti Bimas Gotong Royong, Bimas Baru, Inmas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), Supra Insus, dan Gema Palagung (Gerakan Masyarakat Agribisnis Peningkatan Produksi Padi, Kedelai, Jagung) untuk peningkatan produksi pangan (Nataatmadja *et al.*, 1988; Hafisah dan Sudaryanto, 2004; Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Sejalan dengan upaya peningkatan produksi beras domestik, berbagai bentuk kebijakan operasional pada aspek distribusi dan konsumsi juga diimplementasikan. Pada intinya kebijakan itu berupa:

1. Intervensi pasar input berupa penerapan subsidi (pupuk, pestisida, benih) disertai penerapan teknologi rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas.
2. Intervensi pasar output (padi dan beras) berupa insentif harga bagi petani agar termotivasi untuk meningkatkan penyediaan

beras domestik⁶⁾. Pada waktu tertentu "operasi pasar" dilaksanakan pemerintah berupa menambah pasokan beras ke pasar pada harga tertentu agar harga beras yang tinggi kembali turun pada level yang dapat terjangkau oleh sebagian besar konsumen.

3. Intervensi sistem distribusi beras untuk meningkatkan keseimbangan distribusi antarwaktu (*time*) dan antarwilayah (*spacial*) serta menjamin alokasi beras bagi rakyat miskin dengan harga subsidi (raskin) melalui pengelolaan cadangan dan distribusi pangan pemerintah.

⁶⁾ Pengaturan harga beras/padi oleh pemerintah diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres). Sampai tahun 2002 kebijakan harga yang dianut adalah HD (harga dasar), setelah itu HDPP (harga dasar pembelian pemerintah), dan yang berlaku saat ini HPP (harga pembelian pemerintah).

III. TINJAUAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN SAAT INI

A. Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Majelis dan para undangan yang saya muliakan,

Berbagai lembaga internasional ataupun para ahli ekonomi pembangunan telah membahas adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan (*poverty*) dan ketidak-tahanan pangan (*food insecurity*). Deklarasi *World Food Summit, five years later* menegaskan pentingnya pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan agar kelaparan dan kemiskinan di dunia dapat dihapuskan (FAO, 2002). Hal ini didasari kenyataan bahwa 70% penduduk miskin tinggal di pedesaan dengan sumber utama pendapatan dari sektor pertanian.

Sejalan dengan deklarasi ini, *International Food Policy Research Institute* (IFPRI, 2002) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pencapaian ketahanan pangan di masing-masing negara. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus disertai dengan kemampuan masing-masing negara untuk memanfaatkannya yang dapat memberi manfaat bagi orang miskin, atau disebut *pro-poor growth*. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemberdayaan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik yang efektif merupakan pondasi bagi upaya pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

B. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

Hadirin yang saya muliakan,

Rumusan kebijakan umum ketahanan pangan nasional 2006-2009 tertuang dalam dokumen yang diterbitkan Dewan Ketahanan Pangan (2006). Dalam buku ini dinyatakan secara jelas bahwa ketahanan pangan akan terwujud bila terpenuhinya dua aspek sekaligus, yaitu: (1) pangan tersedia secara cukup dan merata untuk seluruh penduduk, dan (2) setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi atas pangan untuk hidup sehat dan produktif.

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan terfokus pada dua hal pokok. Pertama, adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan domestik. Kedua, besarnya proporsi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Suryana, 2000).

Arah pembangunan ketahanan pangan, yaitu: (1) mewujudkan kemandirian pangan guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah, hingga rumah tangga yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dan (2) perwujudan ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

Pada dasarnya, pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro (rumah tangga serta individu), dan di tingkat makro (nasional). Urutan pencapaian tujuan ini mempunyai makna strategis, karena secara eksplisit pendekatan ini menetapkan pembangunan ketahanan pangan yang ingin dicapai adalah pada tingkat mikro/ rumah tangga.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan tersebut, strategi umum yang diacu adalah strategi jalur ganda (*twin track strategy*), yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, dan (2) memenuhi kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung, disertai dengan upaya memberdayakan mereka agar mampu menolong dirinya sendiri.

Khusus untuk beras, karena strategisnya komoditas ini bagi kehidupan ekonomi dan politik bangsa ini, pemerintah menetapkan suatu pengaturan tersendiri dalam bentuk Instruksi Presiden RI (Inpres), yang dimulai sejak periode pemerintahan Presiden RI Soeharto pada tahun 1970-an. Kebijakan terakhir dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan.

Pada intinya Inpres ini mengatur tujuh pokok kebijakan perberasan nasional, yaitu (Sekretariat Negara, 2005; Nainggolan, 2006):

1. Pemberian dukungan peningkatan produktivitas, kualitas, dan produksi padi.
2. Dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi.
3. Pemberian dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pascapanen gabah/beras.
4. Penentuan kebijakan harga output, berupa harga pembelian oleh pemerintah bagi padi dan beras.
5. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

6. Penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
7. Penetapan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

C. Dinamika Kelembagaan Ketahanan Pangan

Pada awal kemerdekaan, campur tangan pemerintah dalam perwujudan ketahanan pangan ditandai dengan pembentukan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) yang berada di bawah Kementerian Kemakmuran (Kabinet RI Pertama). Setelah itu, dalam periode 1944-1950, walaupun kabinet silih berganti sampai sembilan kali, status dan fungsi lembaga ini tetap bertahan, bahkan meningkat menjadi Kementerian (dengan portofolio) Persediaan Makan Rakyat. Tugas Kementerian ini pada intinya adalah mengumpulkan bahan makanan serta mengawasi, menyimpan, dan mengatur pembagian makanan kepada rakyat (Badan Urusan Logistik, 1971).

Pada era Orde Baru, fokus perhatian program ketahanan pangan adalah pada upaya pengadaan beras dari produksi dalam negeri dengan sasaran tercapainya swasembada pangan (beras). Dalam tujuh periode Kabinet Pembangunan yang dipimpin Presiden Soeharto, walaupun ada perubahan-perubahan dalam struktur kabinet selama tujuh periode tersebut, tugas-tugas berat ini tetap diemban oleh Departemen Pertanian.

Selain Departemen Pertanian, pada era Orde Baru ini kelembagaan lain yang dibentuk melalui Keputusan Presiden untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan adalah:

- Badan Urusan Logistik (Bulog), dibentuk tahun 1967 dengan tugas utama stabilisasi penyediaan dan harga beras domestik (Arifin, 1997; Tirtosudiro, 1997).
- Badan Pengendali Bimbingan Massal (BP Bimas), merupakan lembaga setingkat eselon I di bawah Departemen Pertanian, dengan tugas pokok menggerakkan masyarakat petani meningkatkan produksi padi (Baharsjah, 1997).
- Badan Benih Nasional, dibentuk tahun 1971, merupakan lembaga nonstruktural di bawah koordinasi Menteri Pertanian, dengan tugas utama meningkatkan penyediaan dan distribusi benih padi varietas unggul dengan potensi hasil tinggi.

Pada era reformasi terjadi berbagai perubahan dalam struktur lembaga pemerintahan. Sejalan dengan luasnya cakupan ketahanan pangan, beberapa kementerian yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam pencapaian ketahanan pangan adalah:

- Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam aspek pengelolaan lahan dan air, dan Departemen Perindustrian dan Kementerian Negara BUMN dalam pengelolaan penyediaan input, terutama pupuk.
- Departemen Pertanian, mempunyai tugas utama dalam aspek penyediaan/produksi dalam negeri dengan sasaran swasembada berkelanjutan.
- Departemen Perdagangan dan Bulog diharapkan berperan dalam aspek pengadaan cadangan pangan, pengaturan keseimbangan pasokan, pengendalian harga, dan distribusi untuk penanganan kerawanan pangan transien dan kronis.

- Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) menangani tugas aspek pemanfaatan atau konsumsi pangan, yang menyangkut kualitas dan kerawanan pangan.
- Dewan Bimas Ketahanan Pangan, lalu disempurnakan menjadi Dewan Ketahanan Pangan, merupakan lembaga nonstruktural diketuai Presiden RI, dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Fungsi Dewan ini bersifat koordinatif dalam perumusan kebijakan, dan melaksanakan pemantauan serta pengendalian ketahanan pangan

IV. KERAGAAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan undangan yang saya hormati,

Dalam kurun waktu 35 tahun, penduduk Indonesia meningkat dari 116,2 juta jiwa (tahun 1970) menjadi 219,2 juta jiwa (2005), atau kenaikan yang mencapai hampir 1,9 kali lipat. Pada kurun waktu yang sama, dari lima komoditas utama ketahanan pangan, kecuali untuk kedelai, produksinya secara konsisten meningkat dan melebihi pertumbuhan penduduk. Dalam periode 1970 sampai 2005 produksi padi meningkat 2,8 kali, produksi jagung naik 4,43 kali, produksi gula tumbuh 3,35 kali, dan produksi daging sapi mencapai 2,21 kali lipat.

Dari capaian ini, secara agregat dalam 35 tahun terakhir ketahanan pangan nasional menjadi semakin baik. Kesimpulan ini didukung oleh data perkembangan pendapatan per kapita (nilai riil) yang naik 3,5 kali lipat dan penduduk miskin yang menurun secara absolut dari sebesar 54,2 juta jiwa tahun 1976 menjadi sekitar 39,10 juta jiwa tahun 2006, padahal jumlah penduduk terus meningkat.

Khusus untuk padi, peningkatan produksi ini, selain didukung oleh peningkatan luas sawah (1,5 kali selama 35 tahun), juga secara signifikan didukung oleh peningkatan produktivitas. Dengan demikian, peran teknologi produksi *on-farm* sangat signifikan, yang ditandai oleh adanya revolusi hijau di tahun 1970-an sampai awal 1980-an dengan ditemukannya berbagai varietas unggul dan cara usahatani yang lebih efisien. Selain itu, upaya penyampaian dan penerapan teknologi dipercepat dengan skala besar melalui rekayasa kelembagaan berupa gerakan yang dikomando oleh pimpinan formal (Presiden, Gubernur, Bupati/

Walikota) yang diberi nama Bimbingan Massal (BIMAS) dengan berbagai variasinya dari tahun ke tahun.

Kemandirian pangan secara umum diukur oleh besarnya rasio impor terhadap produksi domestik. Dengan mengkaji data lima tahun terakhir (1999-2004), Indonesia sudah mandiri dalam pemenuhan pangan beras bagi penduduknya yang ditandai oleh rasio impor terhadap produksi yang relatif kecil, yaitu rata-rata 3,7% setiap tahunnya. Kondisi yang sama juga berlaku bagi komoditas minyak goreng (0,2%), daging unggas (0,7%), telur (0,1%), ikan (1,5%), dan buah-buahan (0,7%).

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan terjadi untuk kedelai dan susu. Selama lima tahun terakhir impor kedua komoditas pangan ini meningkat terus dan jauh lebih besar dari produksi domestik, yaitu masing-masing 1,6 dan 3,0 kali lipat. Demikian juga impor gandum yang mencapai rata-rata 3,8 juta ton selama lima tahun terakhir.

Secara nasional, ketersediaan energi dan protein per kapita sudah jauh melebihi standar ketersediaan untuk energi (2.200 kkal/hari) dan untuk protein (52 gram/hari), yaitu masing-masing 3.149 kkal/hari dan 78,3 gram/hari. Di tingkat kecukupan konsumsi, juga didapatkan gambaran yang cukup baik. Pada tahun 2005 konsumsi per kapita energi sebesar 1.997 kkal/hari dan protein 55,2 gram/hari melebihi standar kecukupannya.

Dari aspek harga, stabilisasi harga pangan kebutuhan pokok (terutama beras, gula, minyak goreng, daging) pada hari-hari besar nasional dan keagamaan dapat dipelihara dengan baik. Pemerintah secara intensif memantau ketersediaan serta pergerakan harga dan apabila ada kecenderungan lonjakan harga, maka pemerintah segera mengintervensi pasar. Khusus untuk beras, intervensi tersebut sangat intensif dan hasilnya cukup

memuaskan baik pada masa Orde Baru (Arifin, 1997) maupun masa reformasi (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Namun, implementasi kebijakan stabilisasi harga beras ini mulai dipertanyakan relevansinya pada saat ini karena peran ekonomi beras relatif mengecil terhadap ekonomi nasional dan besarnya biaya untuk melaksanakan kebijakan stabilisasi harga tersebut atau *cost effectiveness* dari kebijakan tersebut (Kasryno, 1997; Pearson *et al.*, 1997; Timmer, 1997). Namun demikian, karena beras adalah komoditas politik, kebijakan stabilisasi harga tersebut tetap diberlakukan sampai sekarang.

Kinerja diversifikasi pangan diukur oleh dinamika pola konsumsi pangan pokok dan pola pangan harapan. Dalam selang waktu 1999-2005, pola konsumsi pangan pokok bergeser dari beragam sumber pangan karbohidrat ke arah yang lebih terfokus pada beras. Pada tahun 2005, dari 33 provinsi, hanya tinggal empat provinsi yang masih mempunyai keragaman sumber pangan pokok karbohidrat, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Papua (Nainggolan, 2007). Namun, di lain pihak dalam periode 2003-2005 dilaporkan ada kecenderungan komposisi pangan dan gizi yang dikonsumsi menjadi semakin baik.

Dari beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa keragaan ketahanan pangan nasional dalam 35 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kesimpulan ini agak berbeda dengan yang dikesankan oleh opini publik dan media akhir-akhir ini.

V. ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

A. Sistem Ketahanan Pangan

Majelis dan para undangan yang saya hormati,

Berdasarkan abstraksi pemikiran penulis, pembangunan ketahanan pangan nasional, bila dikonstruksikan dalam "sistem" dapat disajikan seperti Gambar Lampiran 1 (Suryana, 2003c; 2004a; dan 2004b). Pada intinya, sistem ketahanan pangan nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sistem ketahanan pangan terdiri atas tiga subsistem, yaitu (i) penyediaan atau pasokan, (ii) penyampaian atau distribusi, dan (iii) pemanfaatan atau konsumsi. Ketiga subsistem ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan.
 - i) Penyediaan atau pasokan (*supply*) pangan bersumber dari produksi sendiri, impor, dan stok tahun lalu dikurangi ekspor. Untuk pangan pokok dan strategis, penyediaannya harus dipenuhi dari produksi domestik dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara optimal. Impor dilakukan hanya apabila ketersediaan pangan domestik menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk pangan lainnya, impor dan ekspor pangan dibuka sebagai bagian dari liberalisasi perdagangan. Stok atau cadangan pangan dibangun pada tingkat pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui lumbung pangan desa.
 - ii) Penyaluran atau distribusi (*distribution*) pangan dikembangkan untuk memperbaiki akses atau keterjangkauan fisik dan ekonomi masyarakat atas

pangan. Secara umum distribusi pangan harus diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi untuk pangan pokok dan strategis campur tangan pemerintah masih diperlukan. Upaya mengatasi permasalahan distribusi pangan dilakukan melalui pengelolaan cadangan pangan dan kebijakan harga.

- iii) Pemanfaatan atau konsumsi (*consumption*) pangan merupakan subsistem yang kinerjanya sangat ditentukan oleh dua subsistem pendahulunya. Indikator kinerja dalam pemanfaatan pangan adalah apabila seluruh rumah tangga dapat mengkonsumsi pangan yang bergizi, beragam, dan berimbang sehingga dapat mendukung seseorang untuk hidup sehat dan produktif.
- b. Kinerja ketiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan tersebut akan baik apabila tersedia INPUT yang memadai berupa sumber daya alam (lahan, air, perairan), kelembagaan, budaya, dan teknologi.
 - c. Ketersediaan input saja tidak cukup untuk menggerakkan proses dalam suatu sistem apabila tidak ditunjang oleh pengaturan pemerintah dan partisipasi masyarakat. FASILITASI PEMERINTAH dapat berupa kebijakan ekonomi makro, kebijakan perdagangan dalam negeri dan internasional, pelayanan/fasilitas fisik dan nonfisik, intervensi dan pengelolaan pasar terkendali, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, PERAN MASYARAKAT terutama dalam hal kegiatan produksi, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa pelayanan pangan; peningkatan kesadaran gizi masyarakat; dan pengembangan solidaritas sosial.
 - d. Sinergi yang baik antara input, proses, peran pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan OUTPUT sistem

ketahanan pangan, berupa: (i) pemenuhan HAM atas pangan, (ii) pengembangan SDM berkualitas, (iii) ketahanan pangan, dan (iv) ketahanan nasional berupa stabilitas ekonomi dan politik.

Hadirin yang saya muliakan,

Di dalam Sistem Ketahanan Pangan Nasional, ketahanan pangan dimulai pada tingkat rumah tangga, wilayah dan terakhir nasional. Ada tiga komponen utama pembentukan ketahanan pangan rumah tangga, yaitu produksi sendiri (*production*), cadangan pangan (*stock*), dan pendapatan (*income*). Apabila pendapatannya cukup besar sehingga keseluruhan kebutuhan pangannya dapat secara leluasa dipenuhi dari pasar, maka rumah tangga tersebut termasuk ke dalam rumah tangga tahan pangan, walaupun mereka tidak memproduksi pangan.

Pasar pangan sudah masuk dalam tataran ketahanan pangan wilayah. Pasar pangan dibentuk dari produksi pangan wilayah, impor, dan instrumen perdagangan. Pasar pangan, bersama produksi nasional, cadangan pangan masyarakat, dan bantuan pangan mendukung ketahanan pangan wilayah. Uraian tentang keterkaitan variabel-variabel ketahanan pangan di atas diabstraksikan dalam Gambar Lampiran 2.

Uraian di atas melukiskan: (1) ada perbedaan dalam hal susunan variabel dan keterkaitannya dalam membangun ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan tingkat agregasi di atasnya (wilayah, nasional), dan (2) yang menghubungkan antara sistem ketahanan pangan rumah tangga dengan sistem ketahanan pangan wilayah dan nasional adalah pasar.

Untuk hal itu, pengelolaan pasar pangan terkendali menjadi salah satu faktor kunci dalam hal pencapaian ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat agar mampu memasuki pasar tenaga kerja produktif (pertanian maupun nonpertanian) sehingga individu dan rumah tangga memperoleh pendapatan yang cukup, merupakan salah satu faktor penentu dalam menciptakan ketahanan pangan rumah tangga. Bersamaan dengan itu, penciptaan lapangan kerja produktif menjadi prasyarat bagi tercapainya ketahanan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat nasional.

B. Alternatif Program Ketahanan Pangan

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang saya muliakan,

Dengan adanya perubahan orientasi pembangunan pertanian dari produksi ke agribisnis, maka orientasi kebijakan pangan tidak hanya untuk mencapai swasembada beras, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan petani, produktivitas usahatani, kesempatan kerja, dan pertumbuhan industri pangan (Baharsjah, 1997). Selain itu, setelah Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, sasaran pembangunan pangan diperluas selain pemantapan swasembada beras juga mulai memperhatikan kualitas konsumsi pangan ke arah pangan yang bermutu dan bergizi seimbang (Hasan, 1997). Pandangan kedua mantan Menteri pada Kabinet Pembangunan VI itu masih relevan untuk didalami lebih lanjut dengan kondisi saat ini.

Implikasi kebijakan ketahanan pangan dapat ditempuh melalui empat program pokok yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pada tingkat wilayah ekonomi terkecil, misalnya desa atau kecamatan guna meningkatkan pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut. Dengan pendapatan yang meningkat maka akses rumah tangga pada pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang juga akan meningkat. Program ini penekanannya adalah pada upaya peningkatan kemampuan rumah tangga mengakses pangan, baik dari produksi sendiri maupun dari pasar.

2. Program Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan yang dapat merespon dinamika permintaan pangan penduduk dan mendorong pemerataan penyediaan pangan. Dengan program ini diharapkan akan terjadi optimasi pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumber daya domestik.

3. Program Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan

Sasaran program ini adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketimpangan dalam akses atas pangan baik antarwaktu, tempat, maupun golongan pendapatan, dan mengatasi fluktuasi harga pangan pokok dan strategis. Dengan

upaya ini, kerawanan pangan transien (temporer) atau kronis dapat diatasi dengan lebih baik.

4. Program Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan sesuai dengan standar gizi seimbang, untuk dapat hidup aktif, sehat, dan produktif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan terjadi penurunan konsumsi beras per kapita, peningkatan kualitas asupan pangan, dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas SDM Indonesia.

VI. KESIMPULAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya muliakan,

Bagi suatu negara dengan ciri seperti Indonesia, yaitu wilayah yang menyebar dalam bentuk gugusan-gugusan pulau, jumlah penduduk yang besar dan menyebar tidak merata, ketimpangan pendapatan yang tinggi, dan pertanian merupakan sektor ekonomi utama, maka kebijakan umum negara yang meletakkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar penopang keberlanjutan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia sudah tepat. Secara umum Indonesia sudah mampu menyediakan sebagian besar kebutuhannya dari produksi domestik. Gejolak pasokan dan harga yang terjadi sering kali bukan karena anjloknya kemampuan produksi domestik, tetapi lebih karena faktor eksternal, termasuk dinamika pasar internasional dan aspek ekonomi-politik dalam negeri.

Pada tataran praktis, upaya pencapaian ketahanan pangan sering kali direduksi menjadi kebijakan ekonomi beras, terutama berupa stabilisasi pasokan dan harga. Hal ini dilandasi oleh kenyataan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang hampir semua komponen bangsa memperlakukan beras sebagai komoditas politik. Kondisi seperti ini diperkirakan masih tetap mewarnai kebijakan ketahanan pangan nasional 15 sampai 20 tahun ke depan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, perlu ada penyempurnaan dan *fine tuning* dari program ketahanan pangan yang selama ini telah dilaksanakan. Dalam tulisan ini ditawarkan empat program pokok untuk pencapaian ketahanan pangan yaitu: (1) Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat,

(2) Peningkatan Kapasitas Produksi Pangan, (3) Pengelolaan Distribusi dan Pasar Pangan, dan (4) Peningkatan Mutu Konsumsi Pangan.

VII. PENUTUP

Ketahanan pangan adalah masalah universal. Aspek ini selalu menjadi perhatian penuh mulai dari tingkat rumah tangga, wilayah, nasional dan bahkan global. Hal ini terjadi karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya bukan hanya merupakan kewajiban pribadi masing-masing, tetapi juga sekaligus tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Tanpa pangan yang cukup dalam jumlah dan mutunya, tidak mungkin dapat dibangun bangsa yang berkualitas.

Bagi Indonesia, berdasarkan posisi strategis beras sebagai komoditas pangan, maka padi, beras, nasi adalah salah satu sumber kehidupan utama bangsa ini.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu dan hadirin sekalian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya hormati,

Dalam meniti karier di bidang keilmuan, saya banyak sekali mendapat dorongan, kemudahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa itu semua, tentunya juga tanpa izin Allah SWT, saya tidak mungkin dapat berdiri di forum yang terhormat pada hari ini. Saya berkeinginan untuk menyebutkan satu per satu para pihak yang telah berjasa itu, namun itu tidak mungkin dilakukan karena amat sangat banyak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi apresiasi kepada mereka yang tidak disebutkan, izinkan saya untuk secara khusus menyampaikan apresiasi kepada beberapa orang.

Pertama, terima kasih dan karya ini saya haturkan kepada kedua orang tua, Bapa (alm) yang telah mendorong dan memotivasi anaknya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Beliau berpandangan warisan orang tua kepada anaknya yang paling berharga adalah ilmu, bukan harta benda. Ema (alm) yang dengan caranya yang khas, memberikan dukungan suasana nyaman dan lingkungan yang kondusif bagi anaknya untuk mengejar apa-apa yang dicita-citakannya. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada kakak-kakak kandung, Kang Encep (alm), Teh Haji dan Teh Euis, yang dengan keterbatasan yang dihadapinya, mereka telah secara ikhlas berbagi untuk mendukung adiknya meraih yang didambakannya. Demikian pula saya menyampaikan rasa hormat kepada mertua Bapak Rd. Noerwan Tjakradiwirija dan Ibu Rd. Annie Singawinata.

Di lingkungan sekolah, tentu saja para Bapak dan Ibu Guru sejak dari SDN VIII Banjar, SMPN Banjar, SMAN Ciamis, IPB, hingga di North Carolina State University sangat berperan

dan mewarnai kemampuan saya berkiperah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kepada mereka saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih.

Dari kesemua itu, secara khusus saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada tiga bapak guru yang sangat instrumental bagi pengembangan diri saya. Pertama, Bapak Drs. Suwarna (alm), waktu itu sebagai Wakil Kepala SMA Negeri Ciamis, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama kalinya mengenali kemampuan diri dan mengembangkannya secara leluasa, sehingga mulai tumbuh benih percaya diri bahwa "aku bisa jadi orang". Kedua, Bapak Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasoetion (alm), ketika itu sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, yang membukakan pintu bagi saya untuk menapaki jenjang pendidikan tinggi di IPB, yang sebelumnya saya mengira pintu itu telah tertutup sangat rapat. Ketiga, Bapak Prof. Dr. Ir. Sjarifuddin Baharsjah, ketika itu sebagai Kepala Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian dan Direktur II Sekolah Pascasarjana IPB, yang melebarkan jalan bagi saya untuk menjadi peneliti tangguh dan mengenyam pendidikan S2 dan S3. Pada perjalanan karier selanjutnya, Pak Sjarif juga tidak ragu-ragu membuka jalan kepada saya untuk menapaki kesempatan yang langka dan kepercayaan yang tinggi mengabdikan diri di jalur struktural.

Karier di bidang jabatan fungsional peneliti dan jabatan struktural yang saya jalani secara bersamaan tidak mungkin dapat diemban dengan baik tanpa interaksi dan pengaruh dari atasan, staf, teman seprofesi, dan sahabat. Terlalu banyak kalau saya sebutkan satu per satu, tetapi saya akan merasa menyesal kalau pada kesempatan terhormat ini tidak menyebutkan secara khusus beberapa orang; di antaranya Bapak Prof. Dr. Sjafrri Mangkuprawira, Prof. Dr. Richard A. King,

Prof. Thomas Grennes, Dr. Ir. Faisal Kasryno, Dr. Soetatwo Hadiwigeno, Dr. Ir. Syarifuddin Karama (alm), Prof. Dr. Ir. Justika Baharsjah, Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, Dr. Ir. M. Prakosa, dan Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec. Mereka telah berperan membimbing, memberi kesempatan, dan menempa saya untuk berkarya semaksimal mungkin. Demikian pula saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Iwansah Abdul Hamid, Emka Ibrahim, Budi Afiat, Heri Suherli, Ningrum Djulaeha, Nasfirman Yul, Tjuk Eko Hari Basuki, Sudi Mardianto, Achmad Djauhari, dan Zahiruddin Saleh. Mereka dalam penggalan waktu tertentu dan dalam berbagai kapasitasnya, berperan sebagai mentor, rekan, teman atau sahabat yang penuh pengertian dan pemahaman.

Ungkapan terima kasih dan rasa hormat secara khusus saya sampaikan kepada Menteri Pertanian RI, Bapak Dr. Ir. Anton Apriyantono MS, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk terus berkarya dan memperkenalkan (mengingat kembali) tentang nilai-nilai luhur untuk bekerja secara amanah dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT dan bersalawat buat Nabi Muhammad SAW.

Kepada Kepala LIPI, Prof. Dr. Umar Anggara Jennie, atas dorongannya untuk segera melaksanakan orasi ilmiah ini, saya sampaikan terima kasih banyak. Kepada Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, dan Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Dr. Ir. Haryono, saya sampaikan terima kasih atas segala bantuannya sehingga orasi ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kepada Tim Evaluasi naskah awal orasi ini yaitu Prof. Dr. Pantjar Simatupang, Prof. Dr. Made Oka A. Manikmas, Prof. Dr. Kedi Suradisastra, Prof. Dr. Effendi Pasandaran, dan Prof. Dr. Irsal Las saya sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Kepada Ir. Sudi Mardianto, MS, Ir. Achmad Djauhari, MS, dan Ir. M. Suryadi yang telah membantu mengedit, merancang desain sampul depan, dan mengumpulkan serta menganalisis data untuk naskah ini, serta Derajat Nurbazarah dan Endang Andriyati yang telah dengan sabar membantu menyiapkan naskah orasi ini dengan sangat baik seperti wujudnya yang sekarang, saya juga sampaikan terima kasih.

Yang satu ini saya sengaja simpan pada bagian akhir, karena sifatnya sangat spesial. Kepada istri tercinta Rita Nurmalina Suryana, yang sejak tahun 1980 dalam suka-duka mendampingi, menemani, memahami, dan mendorong (dan pada beberapa kesempatan mengerem karena terlalu kencang) suaminya untuk terus berkarya; serta anak-anak tersayang Anggit, Esty dan Mulky serta menantu Donny yang mencintai Bapaknya sebagai ayah dan sekaligus teman, 'Dad sampaikan permohonan maaf atas kurangnya curahan waktu untuk bersama-sama mengekspresikan kasih sayang dan rasa syukur atas anugerah yang Allah SWT limpahkan kepada keluarga kita'.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B. dan M.H. Sawit. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, Pelajaran Orde Baru dan Orde Reformasi. Badan Urusan Logistik. Jakarta.
- Arifin, Bustanil. 1997. Manajemen Krisis Pangan. *Dalam 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan*. Bulog. Jakarta.
- Arifin, Bustanul. 2004. Penyediaan dan Aksesibilitas Ketahanan Pangan. *Dalam Soekirman et al. (eds). Prosiding WKNPG VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Badan Urusan Logistik. 1971. Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras. Jakarta.
- Baharsjah, S. 1997. Corak Kebijaksanaan Pangan Berkelanjutan dalam Era Liberalisasi. *Dalam 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan*. Bulog. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Rome.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2002. Declaration of The World Food Summit: Five Years Later, International Alliance Against Hunger. Rome.

- Hafsah, M.J. dan T. Sudaryanto. 2004. Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. *Dalam* F. Kasryno, E. Pasandaran, dan A.M. Fagi (eds.) *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Hasan, I. 1997. Kebijakan Pangan Berkelanjutan dalam Liberalisasi Perdagangan. *Dalam* 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog. Jakarta.
- International Food Policy Research Institute. 2002. *Achieving Sustainable Food Security for All by 2020*. Washington, D.C.
- Kasryno, F. 1997. Peran Kebijakan Pengendalian Harga dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Dalam* 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog. Jakarta.
- Kasryno, F. dan E. Pasandaran. 2004. Reposisi Padi dan Beras dalam Perekonomian Nasional. *Dalam* F. Kasryno, E. Pasandaran dan A.M. Fagi (eds.) *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Kasryno, F., E. Pasandaran, dan A.M. Fagi (eds.). 2004. *Ekonomi Padi dan Beras*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2005. *Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia*. Jakarta.
- Mears, L.A. 1982. *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*. (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

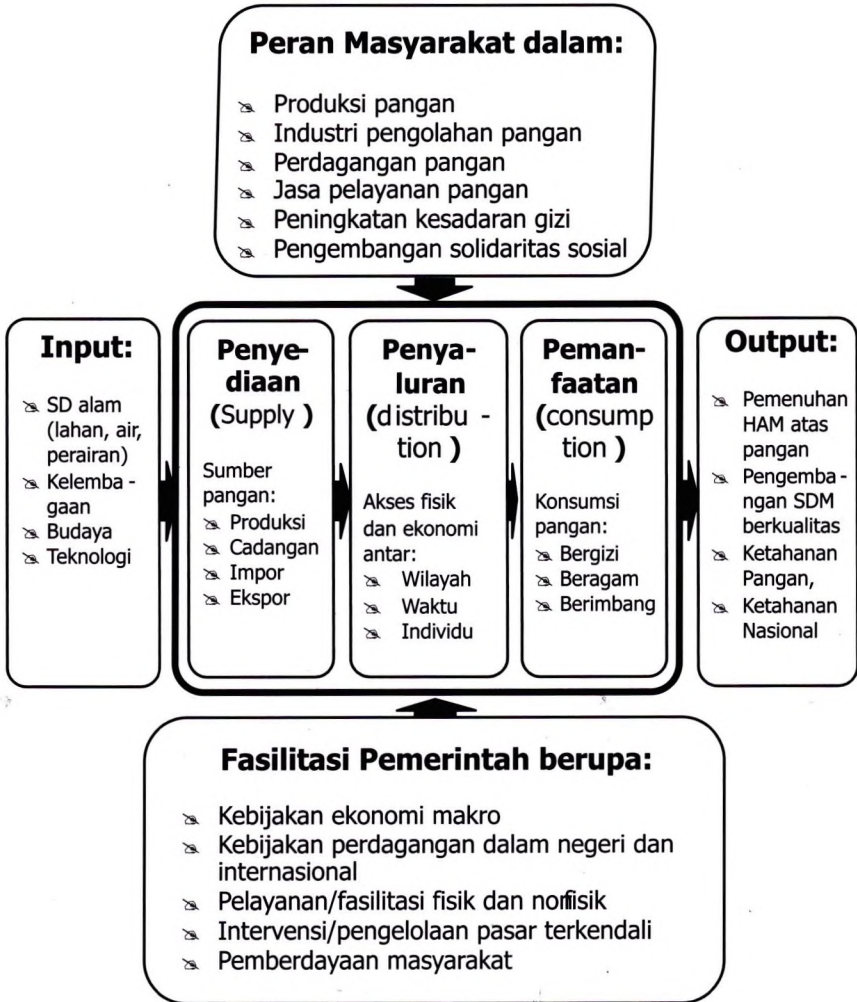
- Nainggolan, K. 2006. Ekonomi Politik Perberasan Nasional. Disajikan dalam diskusi “Politik Beras dalam Membangun Ketahanan Pangan”, Himpunan Alumni IPB. Bogor, 14 Januari 2006.
- Nainggolan, K. 2007. Kebutuhan Inovasi Teknologi Pascapanen dalam Mendukung Program Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan. Disampaikan pada “Sinkronisasi Program Badan Litbang Pertanian”. Bogor. April 2007.
- Nataatmadja, H., D.J. Kertosastro, dan A. Suryana. 1988. Perkembangan Produksi dan Kebijakan Pemerintah dalam Produksi Beras. *Dalam* M. Ismunadji *et al.* (eds.). Padi, Buku I. Puslitbang Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Pearson, S., E. Monke, dan R.S. Baulch. 1997. The Cost of Rice Price Stabilization Under Selfsufficiency. *Dalam* 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog. Jakarta.
- Sawit, M.H., (ed.). 2002. BULOG: Pergulatan dalam Pemantapan Peran dan Penyesuaian Kelembagaan. IPB Press, Bogor.
- Sekretariat Negara. 2005. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2006 Beserta Nota Keuangan. Jakarta.
- Silitonga. C. (ed.). 1997. 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Badan Urusan Logistik. Jakarta.
- Soekirman *et al.* (eds.). 2004. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

- Suryana, A. 1998. Isu Strategis dan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pertanian Memasuki Repelita VII. *Dalam Monograph Series No. 18. Analisis Kebijakan Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Suryana, A. 2000. Peran Sektor Pertanian dalam Memenuhi Kecukupan Pangan Nasional. *Dalam Prosiding Kerja Sama IPPTP Denpasar dengan Universitas Udayana*. Denpasar.
- Suryana, A. 2001a. Kebijakan Ketahanan Pangan. *Dalam Haryadi dan W. Supartomo (eds.). Prosiding Seminar Ketahanan Pangan*. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suryana, A. 2001b. Harmonisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan Daerah. *Dalam Prosiding Pusat Studi Ketahanan Pangan dan Gizi*. IPB. Bogor.
- Suryana, A. dan S. Mardianto (eds.). 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suryana, A. 2002. World Food Summit: Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan. KOMPAS, 18 Juni 2002.
- Suryana, A. 2003a. Review Kebijakan Beras Nasional. *Dalam A. Suryana (eds.). Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE-Yogyakarta.
- Suryana, A. 2003b. Ketahanan Pangan atau Kemandirian Pangan? SUARA PEMBARUAN, 11 Februari 2003.
- Suryana, A. 2003c. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. BPFE-Yogyakarta.

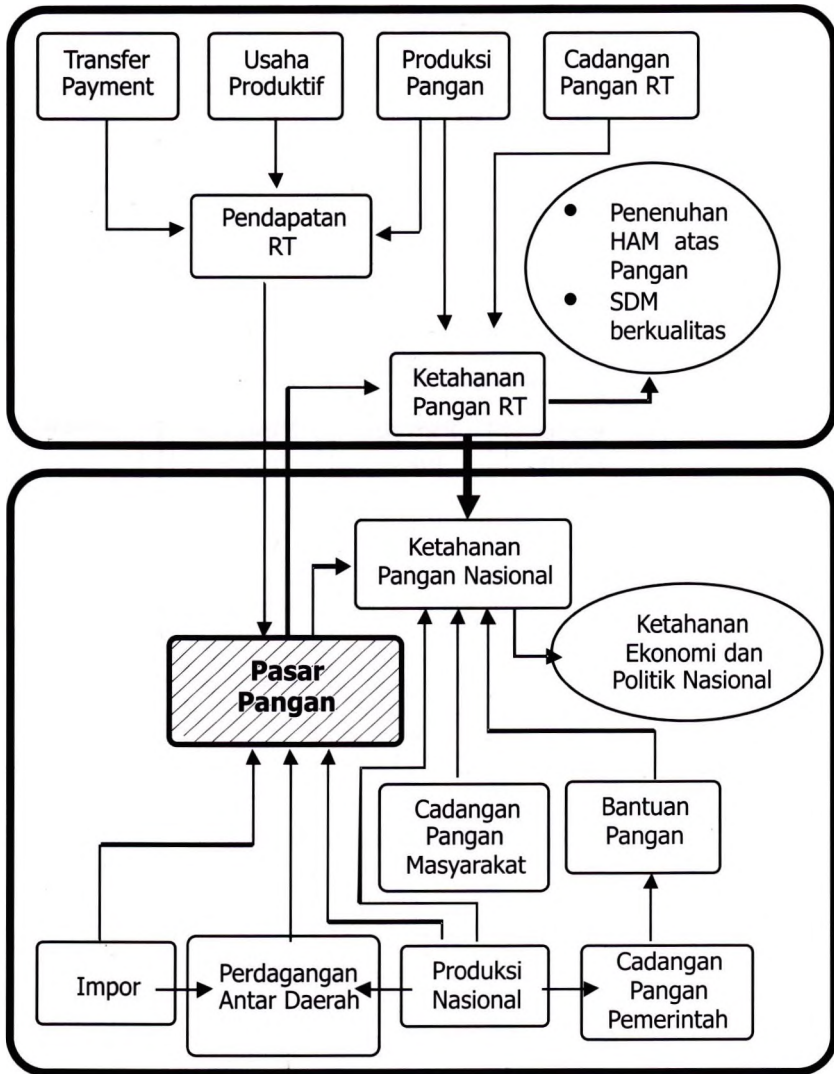
- Suryana, A. (eds.). 2004a. Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian kerja sama dengan Harian Umum Suara Pembaruan. Jakarta.
- Suryana, A. 2004b. Ketahanan Pangan di Indonesia. *Dalam* Soekirman *et al.* (eds) Prosiding WKNPG VIII Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Timmer. C.P. 1997. Does Bulog Stabilize Rice Prices in Indonesia? Should It Try? *Dalam* 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog. Jakarta.
- Tirtosudiro. A. 1997. Kebijakan Pangan Nasional: Dari Manajemen Krisis Pangan Sampai Kesiapan Menghadapi Era Globalisasi. *Dalam* 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Bulog. Jakarta.
- Wiganda. 2003. Dinamika Konsep Ketahanan Pangan. SUARA PEMBARUAN. 9 Agustus 2003.

8

LAMPIRAN



Gambar 1. Sistem Ketahanan Pangan Nasional (Suryana, 2001a, dimodifikasi intensif).



Gambar 2. Keterkaitan Ketahanan Pangan Rumah Tangga dengan Ketahanan Pangan Nasional.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH
(yang relevan dengan topik bahasan)

1. Suryana, A. 1981. Keuntungan Komparatif Usahatani Ubikayu di Daerah Produksi Utama di Lampung dan Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*. 1(1):37-55.
2. Suryana, A., L.A. Daud, dan B. Irawan. 1982. Faktor Agro Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Kualitas Intensifikasi Usahatani Padi Sawah. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 1(1): 27-35.
3. Situmorang, J., A. Suryana dan M. Rachmat. 1982. Pengorganisasian Kelompok Tani Insus. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 1(1): 19-26.
4. Santoso, B., T. Sudaryanto, dan A. Suryana. 1983. Analisa Permintaan Pupuk Urea dan TSP di Tingkat Petani pada Usahatani Jagung. *Jurnal Agro Ekonomi*. 3(1): 1-18.
5. Tabor, S.R., L.I. Nasoetion, A. Suryana, and D.O. Mitchell. 1987. Economic Issues for Agriculture in the Repelita V. *In Round Table Indonesian Agricultural Development for Repelita V*. Bureau of Planning, Ministry of Agriculture. Jakarta. p. 47-66.
6. Suryana, A. 1988. Consumption and Demand for Selected Food in Indonesia. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*. 10(1): 1-8.
7. Suryana, A. 1988. Konsumsi Rumah Tangga Pedesaan. *Dalam F. Kasryno (ed.) Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 333-340.

8. Suryana, A. dan B. Rachman. 1988. Analisa Permintaan Sistem untuk Pangan di Pedesaan Jawa Barat. *Dalam* F. Kasryno (ed.) Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 364-372.
9. Suryana, A., B. Rachman, dan P.U. Hadi. 1988. Pola Pengeluaran untuk Konsumsi di Pedesaan Jawa Barat. *Dalam* F. Kasryno (ed.) Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 352-363.
10. Suryana, A. dan F. Kasryno. 1988. Prevalensi Rumah Tangga Defisit Energi dan Protein menurut Data Susenas 1984. *Gizi Indonesia*. 13(1): 88-95.
11. Suryana, A. dan A. Djauhari. 1988. Konsumsi Makanan Jadi Rumah Tangga Pedesaan Jawa Barat. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. 36(4): 363-373.
12. Arifin, M., A. Suryana, D.H.A. Darmawan, dan H.P.S. Rachman. 1988. Konsumsi dan Karakteristik Rumah Tangga Kurang Energi dan Protein di Nusa Tenggara. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 6(2).
13. Kasryno, F. dan A. Suryana. 1988. Transformasi Struktural Ekonomi Pedesaan Menuju Pengembangan Sentra Industri Pertanian. *Dalam* F. Kasryno (ed.) Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 3-12.

14. Irawan, B., A. Djauhari, dan A. Suryana. 1988. Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Produksi Padi di Jawa Barat. *Dalam* F. Kasryno (ed.) *Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 213-229.
15. Nataatmadja, H., Dj. Kertosastro, dan A. Suryana. 1988. Perkembangan Produksi dan Kebijakan Pemerintah dalam Produksi Beras. *Dalam* M. Ismunadji *et al.* (eds.) *Padi, Buku I*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
16. Suryana, A. dan F. Kasryno. 1989. Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi: Suatu Pengantar. *Dalam* A. Suryana *et al.* (eds.) *Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning Jambi*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 1-7.
17. Suryana, A. dan R.N. Suhaeti. 1989. Ciri Petani Kooperator, Pola Penggunaan Lahan dan Pola Usahatani di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning Jambi. *Dalam* A. Suryana *et al.* (eds.) *Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning Jambi*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 117-146.
18. Suryana, A., Sugiarto, dan B.S. Busyira. 1989. Perkembangan Pola Tanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning. Jambi. *Dalam* A. Suryana *et al.* (eds.) *Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning Jambi*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor. hlm. 164-183.

19. Baharsjah, J. and A. Suryana. 1989. Mixed Farming System in Indonesia. *In Proceedings of International Seminar on Agricultural Change and Development in Southeast Asia*. IPB and Tokyo Univ. of Agriculture. Bogor. p. 52-59.
20. Suryana, A. and R. Nurmalina. 1990. Role of Food Crops Price Policy in Indonesia. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*. 12(3): 40-46.
21. Rachmat, M. dan A. Suryana. 1990. Identifikasi Ciri Rumah Tangga Defisit Energi. *Jurnal Agro Ekonomi*. 9(1): 12-15.
22. Sumaryanto, A. Suryana, dan M. Arifin. 1990. Penggunaan Kedelai, Ubikayu dan Jagung oleh Industri Pengolahan. *Forum Statistik*. 9(3): 25-31.
23. Syafa'at, N., A. Suryana, dan F. Kasryno. 1990. Pengembangan sistem usahatani pekarangan di daerah transmigrasi. *Dalam Risalah Lokakarya Sistem Usahatani di Lima Agro-ekosistem*. Pusat penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. hlm. 127-150.
24. Suryana, A. 1991. The performance of Pekarangan Land and Its Role in the Household Economy: A Case Study of Two Villages in Rural West Java. *In Proceedings of Pekarangan Land: Development Possibilities and Their Contribution to Farmers' Welfare*. CASER and FAO. Bogor. p.167-178.
25. Suryana, A., M. Arifin, dan Sumaryanto. 1991. Konsumsi Ubikayu, Jagung dan Kedelai Rumah Tangga serta Diversifikasi Pangan. *Berita Pergizi Pangan*. 7(1): 1-9.

26. Kasryno, F. dan A. Suryana. 1991. Keragaan dan Prospek Permintaan Domestik Hasil-Hasil Peternakan. *Dalam* Prosiding Simposium Perencanaan Pembangunan Peternakan di NTB, NTT dan Timor Timur. Biro Perencanaan Deptan dan AIDAB. Mataram. hlm. 1-22.
27. Suryana, A. 1992. Mechanisms and Practices of Agricultural Price Policy in Asia and the Pacific: Indonesia Report. Asian Productivity Organization. Tokyo. p. 246-258.
28. Suryana, A. 1992. Poverty Measurement and Agricultural Development Related to Poverty Alleviation. *Indonesian Food Journal*. 3(6): 5-16.
29. Suryana, A. 1992. Kebijakan dan Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi. *Dalam* Risalah Sarasehan Peranan Wanita dalam Program Penganekaragaman Pangan Menyongsong Tahun 2000. UDW Lemsettina Sub Unit Bulog. Jakarta. hlm. 92-103.
30. Suryana, A. and P. Simatupang. 1992. Socio-economic Aspect of Pekarangan Land in Java: A Literature Review. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal*. 14(1): 7-16.
31. Kasryno, F. and A. Suryana. 1992. Rural Poverty Alleviation Programs in Asia: Indonesia Report. Asian Productivity Organization. Tokyo. p. 162-186.
32. Kasryno, F. and A. Suryana. 1992. Long-term Planning for Agricultural Development Related to Poverty Alleviation in Rural Areas. *In* Proceedings of a National Seminar and Workshops: Poverty Alleviation with Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia. CASER and CIIFAD. Bogor. p. 60-70.

33. Suryana, A. dan E. Pasandaran. 1993. Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan. PRISMA. 12(3): 57-67.
34. Ariani, M. dan A. Suryana. 1993. Sistem Permintaan Pangan Kelompok Rumah Tangga di Jawa Timur. Gizi Indonesia. 18(1-2): 90-102.
35. Suryana, A., A.H. Taryoto, dan R.S. Rivai. 1995. Evaluasi Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi. *Dalam* Prosiding Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. hlm. 381-397.
36. Suryana, A. and Erwidodo. 1996. Agricultural Policy Reforms in Indonesia: Accelerating Growth with Equity. Food & Fertilizer Technology Center, Taiwan. Extension Bulletin 434.
37. Suryana, A. dan P.U.Hadi. 1997. Subsidi Benih dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Produksi Pangan. *Dalam* Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Monograph Series No. 17. Bogor. hlm. 199-223.
38. Suryana, A., I W. Rusastra, dan S.H. Suhartini. 1997. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga. *Dalam* Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Monograph Series No. 17. Bogor. hlm. 57-84.
39. Suryana, A. dan K. Kariyasa. 1997. Efisiensi Usahatani Padi Melalui Pengembangan SUTPA. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 15(1&2): 67-81.

40. Suryana, A. dan D.K.S. Swastika. 1997. Kinerja dan Prospek Ketahanan Pangan Pokok. *Dalam 30 Tahun Peranan Bulog dalam Ketahanan Pangan*. Badan Urusan Logistik. Jakarta. hlm. 176-212.
41. Purwoto, A. dan A. Suryana. 1997. Keunggulan Komparatif dan Struktur Proteksi Produk Tanaman Pangan dan Peternakan. *Media Komunikasi dan Informasi Pangan*. 8(32): 18-28.
42. Suryana, A. 1998. Isu Strategis dan Alternatif Kebijakan Pembangunan Pertanian Memasuki Repelita VII. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Monograph Series No. 18.
43. Suryana, A. and S. Bahri. 1998. Rural Development Through Commodity-based and Agribusiness-Oriented Farming System. *In H. Horiuchi and K. Tsubota (eds.) Sustainable Agricultural Development Compatible with Environmental Conservation in Asia*. Japan International Research Center for Agricultural Sciences. Symposium Series No. 6.
44. Suryana, A., A. Bamualim, dan S. Mardianto. 1998. Mengembangkan Sistem Usaha Pertanian Spesifik Lokasi dengan Pendekatan Partisipatif Petani. *Dalam Analisis Kebijaksanaan: Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Monograph Series No. 18. hlm. 57-69.
45. Suryana, A., dan J. Budianto. 1998, Penawaran, Permintaan dan Perilaku Kebiasaan Pangan. *Dalam Prosiding WKNPG VI 1998*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. hlm.147-188.

46. Suryana, A. dan A. Purwoto. 1998. Perspektif dan Dinamika Penawaran Permintaan dan Konsumsi Pangan. *Agro-Ekonomika*. 28(1): 1-16.
47. Suryana, A. dan I.W. Rusastra. 1998. Dampak Kekeringan dan Krisis Moneter Terhadap Produksi Pangan. *Dalam Dampak Krisis Moneter dan Bencana El Nino Terhadap Masyarakat, Keluarga, Ibu Anak di Indonesia*. Kerja sama LIPI dan UNICEF. Jakarta.
48. Kasryno, F., A. Suryana, dan P. Simatupang. 1998. Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pertumbuhan Agro Industri Pedesaan. *Dalam Analisis Kebijakan: Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Monograph Series No. 18. hlm.13-40.
49. Purwoto, A., S. Hartoyo, dan A. Suryana. 1998. Penawaran, Permintaan, dan Konsumsi Pangan Nabati di Indonesia. *Dalam Prosiding WKNPG VI 1998*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. hlm. 541-596.
50. Suryana, A. and S. Bahri. 1999. Indonesia's Key Agricultural Issues: Recent Adjustment Policies. *Agro-Ekonomika*. 29(1): 1-17.
51. Suryana, A. 2000. Peran Sektor Pertanian dalam Memenuhi Kecukupan Pangan Nasional. *Dalam Prosiding Kerja Sama IPPTP Denpasar dengan Universitas Udayana*. Denpasar.
52. Suryana, A. and R. Nurmalina. 2000. Impact of Climatic Change and the Economic Crisis on Food Production in Indonesia. *Global Environmental Research*. Tokyo. 3(2): 177-186.

53. Suryana, A. 2001. Kebijakan Ketahanan Pangan. *Dalam* Prosiding Kerja Sama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan PT. ISM Bogasari. Jakarta.
54. Suryana, A. 2001. Harmonisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan Daerah. *Dalam* Prosiding Pusat Studi Ketahanan Pangan dan Gizi IPB.
55. Suryana, A. 2002. Perspektif dan Upaya Pemanjapan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Dalam* Prosiding Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Pusat Studi Pembangunan IPB.
56. Suryana, A. 2002. Benarkah Impor Pangan Kita Mencemaskan? Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
57. Suryana, A. 2002. Refleksi dan Perspektif Penganekaragaman Pangan. *Dalam* Prosiding PT. ISM Bogasari. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Riset Nasional. Jakarta.
58. Suryana, A. 2002. Kebijakan Perberasan Tidak Hanya Harga Dasar Gabah. SUARA PEMBARUAN. 16 Januari 2002.
59. Suryana, A. 2002. World Food Summit: Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan. KOMPAS. 18 Juni 2002.
60. Suryana, A. 2002. KTT Pangan 2002: Komitmen dan Implementasinya. SUARA PEMBARUAN. 26 Juni 2002.
61. Suryana, A. 2002. Ketahanan Pangan. Mati - Hidupnya Suatu Bangsa. SUARA PEMBARUAN. 10 Desember 2002.
62. Suryana, A. 2002. HIV/AIDS dan Ketahanan Pangan. SUARA PEMBARUAN. 15 Desember 2002.
63. Suryana, A. 2003. Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. LISPI. Jakarta.

64. Suryana, A. 2003. Kinerja Ketahanan Pangan 2002 dan Prospek 2003. SUARA PEMBARUAN. 7 Januari 2003.
65. Suryana, A. 2003, Ketahanan Pangan atau Kemandirian Pangan? SUARA PEMBARUAN. 11 Februari 2003.
66. Suryana, A. 2003. Hari Pangan Sedunia 2003, Banyak Negara Stagnan dalam Proses Pembangunan. SUARA PEMBARUAN. 14 Oktober 2003.
67. Suryana, A. 2003. Bantuan Pangan dalam Konteks Ketahanan Pangan. SUARA PEMBARUAN. 30 Oktober 2003.
68. Suryana, A. dan D. Tjahjadi. 2003. Padat Karya Pangan Inisiatif Daerah, SUARA PEMBARUAN. 8 November 2003.
69. Suryana, A. 2004. Ketahanan Pangan di Indonesia. *Dalam* Soekirman *et al.* (eds) *Prosiding WKNPG VIII Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi.* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
70. Suryana, A. 2007. Implementasi Revitalisasi Pertanian: Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan. Bahan pada Forum Diskusi "Insan Citra Sejahtera". Jakarta, 25 April 2007.

DAFTAR EDITOR MAJALAH ILMIAH DAN PROSIDING

A. Majalah Ilmiah

1. Ketua Dewan Redaksi

- Jurnal Agro Ekonomi, diterbitkan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1987-1989.
- Majalah Agro Ekonomika, diterbitkan Pengurus Pusat PERHEPI, 1997-2000.

2. Anggota Dewan Redaksi

- Indonesian Agricultural Research and Development Journal, diterbitkan Badan Litbang Pertanian, 1987-1992.
- Jurnal Agro Ekonomi, diterbitkan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, 1990-1994.
- Forum Penelitian Agro Ekonomi, diterbitkan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1993-1995.

B. Prosiding

1. Kasryno, F., A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, dan C.A. Rasahan. 1988. Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
2. Pasandaran, E., P. Simatupang, T. Sudaryanto, A. Suryana, C.A. Rasahan, dan A. Djauhari. 1989. Prosiding Patanas: Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

3. Suryana, A., A. Djauhari, dan E. Pasandaran. 1989. Hasil Penelitian Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning, Jambi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
4. Suryana, A., A. Pakpahan, dan A. Djauhari. 1990. Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
5. Pawitan, H., A. Suryana, I. Amien, A. Pakpahan, R. Boer, S. Yahya, I. Las, E. Sjamsudin, M. Hadad E.A., Yusmin, J. Pitono, Bursatriannyo, dan D. Sutisna. 1996. Prosiding Seminar Nasional Gerakan Hemat Air. Kerjasama Lemhannas, Perhimpni, dan Perhepi. Jakarta.
6. Suryana, A., T. Sudaryanto, dan S. Mardianto. 1997. Monograph Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif. Monograph Series No.17. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
7. Suryana, A., Erwidodo, P.U. Hadi, R.N. Suhaeti, dan S. Mardianto. 1998. Monograph Analisis Kebijakan: Pembangunan Agribisnis di Pedesaan dan Analisis Dampak Krisis. Monograph Series No. 18. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
8. Suryana, A. dan S. Mardianto. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
9. Pambudy, R., S. Mardianto, N. Pribadi, T.E.H. Basuki, dan A. Suryana. 2003. Ekonomi Gula 11 Negara Pemain Utama Dunia. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
10. Suryana A. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Ketahanan Pangan. BPFE-Yogyakarta.

11. Suryana, A. 2004. Kemandirian Pangan Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Kerja Sama Badan Bimas Ketahanan Pangan dengan Harian Umum Suara Pembaruan. Jakarta.

KEGIATAN LAIN/ORGANISASI PROFESI

1. Darma Bakti Keilmuan

- 1987-1998 : Dosen luar biasa Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (Jurusan Ekonomi Pertanian).
- 1988-1992 : Dosen luar biasa Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Bangsa, Bogor.
- 1988-1990 : Dosen luar biasa Fakultas Ekonomi, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- 1987-2004 : Anggota Komisi Pembimbing penulisan tesis S2 dan disertasi S3 mahasiswa pada Program Pascasarjana IPB, Magister Manajemen IPB, dan Universitas Padjadjaran. Jumlah mahasiswa bimbingan yang telah menyelesaikan studi sebanyak 48 orang S2 dan lima orang S3.

2. Profesi

- Anggota Pengurus Pusat PERHEPI, 1989-1993
- Sekretaris II Pengurus Pusat PERHEPI, 1993-1996
- Ketua Koordinator Bidang, Pengurus Pusat PERHEPI, 1996-1999, 1999-2003
- Anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat PERGIZI PANGAN, 2001-2003
- Panitia Pelaksana dan Pengarah Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi IV (1988) s/d VIII (2004)
- Wakil Ketua Komisi Bioetika Nasional, 2004-2009

- Anggota Dewan Riset Nasional, 2005-2008
- Anggota Policy Advisory Council Australian Centre for International Agricultural Research (PAC – ACIAR), 2005-sekarang

RIWAYAT HIDUP



ACHMAD SURYANA dilahirkan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 22 Juli 1954. Ia merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara dari Bapak Momo Kartaamidjaja dan Ibu Enok Maemunah. Ia menikah pada tahun 1980 dengan Rita Nurmalina dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Anggita Tresliyana Suryana (1981), Esty Asriyana Suryana (1983), dan Muhammad Rizkimuluk Suryana (1993).

Menyelesaikan sekolah SD Negeri VIII Banjar tahun 1967, SMP Negeri Banjar tahun 1970 dan SMA Negeri Ciamis, tahun 1973. Pendidikan tinggi yang ia tempuh adalah S1 (Ir.) di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan keahlian Sosial Ekonomi Pertanian tahun 1978, S2 (MS) di IPB dengan keahlian Ekonomi Pertanian tahun 1980, dan S3 (Ph.D.) di North Carolina State University (NCSU), Raleigh, North Carolina, Amerika Serikat dengan keahlian Ekonomi tahun 1986. Selain pendidikan formal, ia pernah mengikuti pelatihan penjenjangan dan bidang ilmu di dalam negeri, Filipina, Amerika Serikat, dan Australia.

Ia memulai bekerja tahun 1978 segera setelah menyelesaikan S1-nya sebagai calon peneliti pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian. Jenjang jabatan fungsionalnya dimulai sebagai Ajun Peneliti Muda (pada tahun 1988), Peneliti Madya (1989), Ahli Peneliti Madya (1992), dan Ahli Peneliti Utama sejak bulan Maret 1997. Pada saat itu golongannya mencapai IV/c dan sejak Oktober 1999 mencapai golongan tertinggi IV/e.

Bersamaan dengan karier pada jabatan fungsional, ia juga menapaki karier jabatan struktural yang dirintisnya mulai sebagai pejabat eselon IV/a Kepala Subbidang Informasi pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian (1981), kemudian setelah menyelesaikan S3 diangkat menjadi pejabat eselon III/a sebagai Kepala Bagian Perencanaan Umum Biro Perencanaan Departemen Pertanian (1990). Selanjutnya ia menjadi pejabat eselon II/a di tiga tempat, yaitu sebagai Kepala Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis (1994/1995), Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian (1995/1998), dan Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian (1998/2000). Kariernya sebagai pejabat eselon I dimulai sebagai Kepala Badan Urusan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian (2000/2001), Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian (2001/2004), Direktur Jenderal Tanaman Pangan (2005/2006), dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Januari 2004 sampai kini).

Di bidang kepakarannya, ia aktif sebagai anggota Pengurus Pusat PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia) pada empat kepengurusan dari tahun 1989 sampai 2003, Pengurus Pusat PERGIZI Pangan (2001-2003), ikut dalam kepanitiaan baik sebagai pelaksana maupun pengarah dalam Widya Karya Pangan dan Gizi IV (1988) sampai VIII (2004), dan Anggota Dewan Riset Nasional (2005-2008) dan Wakil Ketua Komisi Bioetika Nasional (2005-2008).

Pengabdian di bidang pembinaan keilmuan ia lakukan dengan menjadi anggota Dewan Redaksi beberapa publikasi ilmiah yaitu Indonesian Agricultural Research and Development Journal (anggota), Jurnal Agro Ekonomi (anggota, ketua), Forum Penelitian Agro Ekonomi (anggota), dan Majalah Agro Ekonomika

(ketua) pada berbagai periode penugasan dari tahun 1987 sampai 2000. Selain itu ia pernah menjadi dosen luar biasa di Sekolah Pascasarjana IPB dan Magister Manajemen Agribisnis IPB (1987-1998), Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya Jakarta (1988-1990), dan Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Bangsa (1988-1992). Ia menjadi anggota komisi pembimbing penulisan tesis S2 di IPB sebanyak 48 orang dan disertasi S3 di IPB dan Universitas Padjadjaran sebanyak lima orang.

Atas pengabdian dan kinerjanya di Departemen Pertanian, ia mendapatkan Satyalancana Karya Satya X (tahun 1996), Satyalancana Wira Karya (1997), Satyalancana Pembangunan (1999), dan Satyalancana Karya Satya XX (2003).

